

Judul : Marak kejahatan digital, senayan minta OJK edukasi masyarakat
Tanggal : Jumat, 19 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Marak Kejahatan Digital Senayan Minta OJK Edukasi Masyarakat

KALANGAN politisi Senayan menyoroti pesatnya perkembangan teknologi sektor jasa keuangan yang mesti diikuti dengan penguatan sistem peringatan dini terhadap berbagai bentuk penipuan keuangan digital.

Anggota Komisi XI DPR Harris Turino mengatakan, perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam sistem pembayaran. Sayangnya, kemajuan akses terhadap layanan keuangan itu ikut dimanfaatkan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab.

Situasi itu membuat digitalisasi memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang bagi publik. "Di satu sisi memberikan kemudahan transaksi dan investasi, tapi di sisi lain sistem itu bisa memicu peluang kejahatan sektor keuangan yang harus diantisipasi secara serius," jelas Harris, di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Karena itu, Harris meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan terhadap sektor keuangan digital. Langkah itu dilakukan melalui pemantauan pelaku industri jasa

keuangan serta melalui edukasi masyarakat. Dengan demikian, perlindungan konsumen bisa berjalan dengan baik.

Menurutnya, berbagai kasus penipuan, perjudian daring, hingga pinjaman online (pinjol) ilegal masih jadi tantangan besar. Meskipun berbagai upaya penindakan telah berjalan, para pelaku kejahatan digital kerap muncul kembali. Mereka menjebak korban dengan menggunakan identitas dan modus berbeda.

Dia mencotahkan fenomena pinjol ilegal yang memiliki

jumlah jauh lebih besar daripada penyelenggara berizin resmi. Kondisi itu sangat memprihatinkan, serta menunjukkan bahwa pengawasan serta edukasi masyarakat harus berjalan beriringan. "Agar masyarakat tidak mudah jadi korban penipuan," ujarnya.

Harris menambahkan, saat ini hanya sebagian kecil penyelenggara yang beroperasi secara resmi di tengah masyarakat. Di saat yang sama, para pelaku ilegal terus bermunculan dengan berbagai cara. Karena itulah, fungsi peringatan dini harus diperkuat untuk meminimalisir risiko kerugian.

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan soal menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional di Indonesia. Kepercayaan investor dan masyarakat luas itu jadi faktor utama dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Apalagi di tengah situasi dan tantangan ekonomi domestik.

OJK, sambungnya, harus melakukan berbagai langkah perbaikan tata kelola serta penguatan pengawasan pasar keuangan Indonesia. "Upaya itu demi memastikan pasar

domestik aman, sekaligus tetap menarik bagi para investor, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan kejahatan digital," ucapnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menegaskan, pihaknya terus menggencarkan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal yang merugikan masyarakat. Hingga Mei 2026, OJK menerima 17.105 pengaduan entitas ilegal sejak awal tahun. ■ PYB